

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 mengemukakan bahwasannya Reformasi Birokrasi telah memasuki periode ketiga dari *grand design* Reformasi Birokrasi nasional yang pada tahap akhir ini diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia atau (*World Class Bureaucracy*) dicirikan dengan beberapa hal, yaitu tata kelola dan pelayanan publik yang semakin berkualitas, efektif dan efisien.

Adapun dalam peraturan tersebut beberapa area perubahan reformasi birokrasi ini berkaitan dengan penataan organisasi dan penataan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM Aparatur) yang berkaitan dengan perubahan mindset dan budaya kinerja di lingkungan organisasi agar lebih berintegritas dan profesional sehingga mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa (Kementrian PANRB, 2020).

Dalam mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien tersebut maka perlu dilakukannya pembangunan aparatur negara serta penataan organisasi melalui reformasi birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme aparatur negara baik di pusat maupun di daerah (Kementrian PANRB, 2011).

Provinsi DKI Jakarta memiliki 42 perangkat daerah yang terdiri dari 22 Dinas, 10 Badan dan 10 Biro. Satu diantara sepuluh biro tersebut ialah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Biro ORB) yang merupakan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Melalui Asisten Pemerintahan.

Biro ORB bertugas dalam mengoordinasikan, merumuskan, menyusun kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam bidang kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,

tatalaksana, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik analisis jabatan, analisis beban kerja, pelaporan, pengoordinasian kebijakan pengelolaan kepegawaian, sistem informasi daerah, korps pegawai dan pelayanan terpadu satu pintu seperti yang dituliskan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 247 tahun 2014.

Biro ORB dapat dikatakan sebagai SKPD penggerak dari reformasi birokrasi di pemerintah provinsi DKI Jakarta, sehingga arus komunikasi yang terjalin didalamnya sangat kompleks dan juga menjadi sebuah organisasi yang memiliki peran penting bagi Satuan Kerja atau pun Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

koponen_penilaian	tahun	bobot_nilai	nilai
Manajemen Perubahan	2017	5	1.21
Penataan Peraturan Perundang-undangan	2017	5	2.09
Penataan dan Penguatan Organisasi	2017	6	3.84
Penataan Tatalaksana	2017	5	3.93
Penataan Sistem Manajemen SDM	2017	15	12.78
Penguatan Akuntabilitas	2017	6	3.95
Penguatan Pengawasan	2017	12	6.44
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2017	6	4.81
Nilai Akuntabilitas Kinerja	2017	14	8.42
Survei Internal Integritas Organisasi	2017	6	5.34
Survei Eksternal Persepsi Korupsi	2017	7	6.11
Opini BPK	2017	3	2
Survei Eksternal Pelayanan Publik	2017	10	8.55
Manajemen Perubahan	2018	5	1.82
Penataan Peraturan Perundang-undangan	2018	5	2.09
Penataan dan Penguatan Organisasi	2018	6	3.84
Penataan Tatalaksana	2018	5	3.77
Penataan Sistem Manajemen SDM	2018	15	12.76
Penguatan Akuntabilitas	2018	6	4.01
Penguatan Pengawasan	2018	12	6.46
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2018	6	4.82
Nilai Akuntabilitas Kinerja	2018	14	9.11
Survei Internal Integritas Organisasi	2018	6	4.9
Survei Eksternal Persepsi Korupsi	2018	7	6.14
Opini BPK	2018	3	3
Survei Eksternal Pelayanan Publik	2018	10	8.2

Gambar 1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

(Sumber: <https://data.jakarta.go.id/dataset/indeks-reformasi-birokrasi-pemerintah-provinsi-dki-jakarta>)

Dari data yang didapatkan mengenai indeks reformasi birokrasi di pemerintah provinsi DKI Jakarta ini menunjukkan bahwasannya nilai yang didapatkan masih jauh berada dibawah bobot nilai yang sudah ditentukan sebagai indeks dari reformasi birokrasi, oleh karena itu hal ini harus terus menjadi perhatian agar Reformasi Birokrasi dengan karakter yang berkelas

dunia ini dapat tercapai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020.

Area reformasi birokrasi ini dapat dievaluasi melalui umpan balik hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu sendiri, dimana dalam memperoleh umpan balik tersebut dapat dilakukan Audit Komunikasi menggunakan analisis jaringan agar tergambarkannya suatu kondisi sehingga dapat diketahui kelemahan dan kelebihan yang harus ditangani terutama berkaitan dengan kesuksesan suatu organisasi.

Sejalan dengan yang dikemukakan dalam buku analisis jaringan komunikasi karya eriyanto bahwasannya kesuksesan suatu organisasi tidak bisa lagi hanya mengandalkan hierarki atau birokrasi organisasi saja, organisasi harus menekankan pada relasi antara anggota organisasi dimana jaringan dapat menjadi satu hal yang menunjang kesuksesan organisasi.

Suatu organisasi ditunjang dengan interaksi atau komunikasi dalam pencapaian tujuan bersama. Komunikasi organisasi merupakan suatu proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi (R. Wayne Pace Don F, 2002). Proses interaksi dan hubungan antar individu yang memiliki tujuan atau kepentingan bersama dapat menghasilkan sebuah jaringan dari komunikasi yang dilakukannya. Proses interaksi dan komunikasi tersebut mampu dikaji melalui fenomena komunikasi.

Proses fenomena komunikasi dapat dilihat melalui cara individu berkomunikasi dalam kelompok atau organisasi yang kemudian akan terhubung satu sama lain (Monge & Contractor, 2003). Audit komunikasi merupakan kajian Komprehensif atau menyeluruh dan mendalam mengenai filsafat komunikasi beserta konsep, struktur, arus bahkan praktek komunikasi didalam organisasi baik dalam organisasi kecil atau besar yang diharapkan dapat mengetahui kemacetan informasi, hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif serta peluang yang disia-siakan (Emmanuel, 1985).

Analisis jaringan atau *network analysis* merupakan satu dari lima alat pengukuran dalam audit komunikasi yang dikemukakan oleh Goldhaber dan dikukuhkan oleh ICA atau International Communication Association

(Hardjana, 2014). Analisis jaringan komunikasi itu sendiri merupakan metode penting dalam kajian komunikasi. Jaringan komunikasi menekankan pada posisi aktor dan kekuatan aktor dalam struktur sosial, penekanan tersebut membuat pendekatan jaringan sosial dapat menjelaskan kondisi yang muncul, konflik serta dinamika.

Sebagai 4embag komunikasi organisasi di suatu perusahaan diteliti menggunakan pendekatan jaringan ini maka jaringan komunikasi diperuntukkan dalam mempelajari posisi masing-masing aktor dalam hal ini para pegawai di dalam suatu perusahaan atau organisasi sehingga dapat ditentukan dan dapat dijadikan rujukan bagi seluruh anggota perusahaan atau organisasi. Kesuksesan suatu organisasi dikarenakan jaringan menjadi hal yang penting untuk disadari dengan kata lain organisasi berhasil, tidak bisa lagi hanya mengandalkan hierarki atau birokrasi organisasi saja, organisasi harus menekankan pada relasi antara anggota organisasi (Eriyanto, 2014).

Jaringan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur sosial yang tercipta untuk melakukan suatu komunikasi antara individu dengan individu lainnya dengan membuat kontak serta hubungan juga saluran komunikasi dimana terdapat pengaruh dan kekuasaan yang disalurkan melalui manajemen baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal di dalam suatu organisasi (R. Wayne Pace Don F, 2002).

Proses pertukaran informasi yang terjadi diantara individu merupakan inti dari suatu aktivitas komunikasi yang dilakukannya guna mencapai suatu pemahaman yang seragam dan mencapai saling pengertian mengenai suatu hal. Proses pertukaran informasi tersebut dapat membentuk suatu hubungan komunikasi yang terpola diantara para individu dalam suatu rangkaian jaringan. Hal tersebut yang dapat menciptakan jaringan komunikasi di dalam suatu organisasi. Adapun struktur dari jaringan komunikasi itu sendiri seperti *isolate, star, liason, gate keeper, bridge* (Rogers & Kincaid, 1981).

Penelitian mengenai analisis jaringan komunikasi sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian mengenai analisis jaringan diantaranya studi

jaringan yang dilihat sebagai proses interaksi, hubungan dan komunikasi dari berbagai disiplin ilmu terutama disiplin ilmu komunikasi.

Penelitian ini merupakan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan analisis jaringan komunikasi diantaranya yaitu studi yang berjudul Penggunaan studi jaringan mengenai jaringan komunikasi ‘inovasi beras sehat’ yang dilakukan guna mengetahui gambaran adanya peranan, klik dan struktur komunikasi ‘Inovasi Beras Sehat’ di Desa Sudimoro dan Desa Daleman Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten (Kusumadewi et al., 2020).

Penelitian selanjutnya membahas tentang sistem jaringan komunikasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari dalam menanggulangi banjir yang terjadi. Penelitian menunjukkan hasil maksimal dalam hal pencegahan dan penanggulangan banjir berupa 5embaga5t yang dibangun oleh BPBD kota 5embaga sebagai 5embaga5tor lapangan, selain itu 5embaga ini telah membangun hubungan yang baik dengan 5embaga-lembaga daerah dalam upaya pencegahan dan penggulangan bencana banjir, disisilain, 5embaga ini juga telah merekrut relawan – relawan siaga bencana dalam mempermudah tugas dan tanggung jawab BPBD sebagai Lembaga yang mampu memberikan kenyamanan dari bahaya bencana dan dalam berupaya membangun koordinasi yang baik dengan masyarakat (Fachrudin, 2017).

Pola Jaringan Komunikasi Internal Pemerintah Kota Denpasar dalam Mengelola Program PRO Denpasar+. Penelitian tersebut berkaitan dengan memaksimalkan kerja pemerintah dalam mengelola setiap media komunikasi yang digunakan, pemerintah sebagai sebuah organisasi memerlukan proses komunikasi yang dilakukan secara formal dan informal oleh seluruh pekerja yang terlibat di dalamnya. Pola jaringan komunikasi internal Pemerintah Kota Denpasar dalam mengelola program PRO Denpasar+ membentuk empat klik yang menggambarkan kecenderungan interaksi yang dilakukan oleh anggota organisasi, baik atasan dengan bawahan dan sebaliknya (Luh et al., 2016).

Berdasarkan studi mengenai jaringan yang sudah dipaparkan diatas terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan. Pertama, studi jaringan telah

dilakukan di Indonesia juga internasional dan menunjukkan topik yang beranekaragam. Kedua, studi jaringan komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu pengetahuan terutama secara mendalam dengan metode audit komunikasi dengan mengkaji berbagai macam aspek dan penelitian ini yaitu mengenai jaringan komunikasi. Ketiga, pemaparan kajian studi jaringan dalam instansi pemerintahan dapat dilihat sebagai bentuk evaluasi melalui umpan balik berkaitan dengan area perubahan reformasi birokrasi dalam hal penataan organisasi dan penataan SDM Aparatur dimana interaksi dan hubungan yang terjadi ini dapat dilihat sebagai fenomena komunikasi.

Berdasarkan latarbelakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memfokuskan penelitian mengenai fenomena interaksi atau komunikasi yang dilakukan antar pegawai di Biro ORB dengan menggunakan analisis jaringan komunikasi dengan Jaringan Utuh (Complete Network) pada Level Aktor, Kelompok dan Sistem guna mengidentifikasi dan memetakan struktur jaringan secara utuh dari pola-pola interaksi dan komunikasi para pegawai di Biro ORB sebagai bentuk evaluasi melalui umpan balik pelaksanaan reformasi birokrasi dengan area perubahan berupa penataan organisasi dan Aparatur SDM. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan jaringan komunikasi pada instansi pemerintahan tepatnya pada Biro ORB.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Jaringan Komunikasi secara utuh (Complete Network) pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat diturunkan beberapa rumusan masalah lainnya diantaranya yaitu :

1. Bagaimana keterhubungan antar aktor dalam jaringan komunikasi di Biro ORB?

2. Bagaimana sub-kelompok (klik) dalam suatu sistem serta peranan khusus seseorang dalam jaringan komunikasi?
3. Bagaimana struktur jaringan komunikasi berupa derajat keterhubungan, rata-rata keterhubungan sistem, serta densitas dalam struktur jaringan komunikasi,

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, dapat dituliskan bahwa tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan Jaringan utuh dalam Biro ORB dengan metode Audit Komunikasi menggunakan Analisis Jaringan sehingga lebih detail penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memetakan keterhubungan antar aktor dalam jaringan komunikasi
2. Menjelaskan sub-kelompok atau klik pada suatu sistem dan menjelaskan peranan khusus seseorang dalam jaringan komunikasi
3. Menjelaskan struktur jaringan komunikasi berupa derajat keterhubungan, rata-rata keterhubungan sistem serta densitas dalam struktur jaringan komunikasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan akademis yang berkaitan dengan kontribusi yang akan diberikan dalam penelusuran keilmuan dan kegunaan praktis sebagai gambaran manfaat dan hasil penelitian bagi masyarakat maupun para peneliti. Kegunaan penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Mampu memberikan kontribusi dalam berbagai perkembangan ilmu komunikasi, terutama yang berkaitan dengan audit komunikasi berupa jaringan komunikasi dari suatu instansi pemerintahan yang dilaksanakan dari tahap perencanaan hingga hasil akhir
- b. Memberikan wawasan pengetahuan tambahan bagi penulis, maupun pembaca atau khalayak dalam penelitian ini.

- c. Mampu memberikan stimulus dan kesempatan bagi penulis untuk mengeksplorasi ilmu yang didapatkan saat kuliah kedalam sebuah karya ilmiah

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu memecahkan masalah atau kekurangan yang berkembang saat ini di dalam suatu instansi pemerintahan, memberikan masukan, penilaian, sumbangan pemikiran dan pertimbangan yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya kepada pihak Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan efektifitas komunikasi yang dilakukan dalam kegiatan pekerjaan seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya kesuksesan suatu organisasi tidak bisa lagi hanya mengandalkan hierarki atau birokrasi organisasi saja, organisasi harus menekankan pada relasi antara anggota organisasi dimana jaringan dapat menjadi satu hal yang menunjang kesuksesan suatu organisasi dengan ditelitinya jaringan komunikasi di dalam organisasi ini sehingga dalam menjalankan program kerja dimasa yang akan datang dapat tercipta pelayanan dan komunikasi yang lebih baik lagi sebagai organisasi pemerintahan pada level Provinsi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan uraian hal hal yang relevan dengan topik kegiatan pelaksanaan audit komunikasi dengan Teknik jaringan komunikasi di Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, Penjelasan perumusan permasalahan yang hendak diketahui, Penjelasan mengenai tujuan yang hendak dicapai, manfaat dari penelitian baik akademis maupun praktis, Sistematika Penulisan atau urutan proses penyajian laporan.

BAB II:**TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian terdahulu, Konsep-konsep Penelitian, Teori Penelitian, Kerangka Berfikir, Hipotesis.

BAB III:**METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi Penelitian, Populasi, sampel, Metode Pengumpulan data, Metode Analisis Data, Waktu dan Lokasi Penelitian.

BAB IV:**PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan mengenai profil objek penelitian, analisis deskripsi hasil penelitian serta pembahasan terhadap masalah penelitian berdasarkan analisis statistic.

BAB V:**KESIMPULAN**

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran penelitian.

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA

Referensi yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian terkait audit komunikasi dengan Teknik jaringan komunikasi di Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN**LAMPIRAN**

Beberapa hal yang mendukung laporan ini, seperti surat pengambilan data di Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, beberapa foto kegiatan selama penelitian berlangsung.